

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2011). *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus Dan Pelaku* (Pertama). Jakarta: Accompli Publishing.
- Ali, M. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (1st Ed.). Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Tarmizi, Ed.) (1st Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. (M. Sari, Ed.) (Pertama). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2016). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (S. Wahyudi, Ed.) (Kedua). Malang: Media Nusa Creative.
- Dwidja, P. (2008). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia* (Ketiga). Bandung: Cv. Utomo.
- Fachmi. (2011). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Pertama). Bogor: Pt. Ghalia Indonesia Publishing.
- Hamzah, A. (2011). *Kamus Hukum* (Kedua). Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. (Tarmizi, Ed.) (1st Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. . (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. (Y. S. Hayati, Ed.) (Pertama). Jakarta: Erlangga.
- Ishaq. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Y. Ali, Ed.) (Edisi Revi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairani. (2016). *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing* (1st Ed.). Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Kiki, K. (2015). Perbuatan Eigenrighting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Hukum*, 2(Universitas Palangka Raya), 1–17. <https://doi.org/2356-1440>

- Lamintang. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (2nd Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revi). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Merpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revi). Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Muliawan. (2015). *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal (Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat)*. (H. Masyukur, Ed.) (201st Ed.). Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Na'im, R. F. (2016). Analisis Problematik Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang). *Hukum*, 3(Universitas Negeri Surabaya), 1–10. <https://doi.org/2460-1543>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Pertama). Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, B. (2008). *Tindak Pidana Mayantara* (Kedua). Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2015). *Hukum Pidana*. (A. Pabbu, Ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana* (Cetakan 4). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st Ed.). Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso, R. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan Ke). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,Cv.
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sungguno, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaputra, R. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti. *Hukum*, 1(Universitas Riau), 1–15. <https://doi.org/2065-0215>
- Taufiqurrohman. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Oleh Massa Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor. *Hukum*, 18(Uin Sunan Ampel Surabaya), 1–15. <https://doi.org/2502-3101>
- Wahyuni, F. (2013). Telaah Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Hukum*, 3(Universitas Islam Indragiri), 7. <https://doi.org/1978-5186>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat dengan UUD 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman